



Buletin Parlamentaria

Nomor 1010/I/VI/2018 • Juni 2018



DPR Ajak Pejabat Negara Perkuat Silaturahmi



Indonesia - Austria Ingin Kembangkan Kerja Sama

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pimpinan DPR lainnya buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan para pejabat penyelenggara negara

DPR Ajak Pejabat Negara Perkuat Silaturahmi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun para pejabat yang menjadi penyelenggara negara senantiasa menguatkan silaturahmi demi persatuan bangsa. Terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini, sehingga bisa saling bekerjasama dan menghindari sikap saling menyalahkan.

“ Yang paling penting harus dibangun adalah sikap saling menguatkan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Bagi DPR, tentu sebagai lembaga perwakilan rakyat harus senantiasa menjalankan fungsi *check and balances* antar cabang kekuasaan negara sesuai koridor UUD 1945. Semuanya dalam kerangka membangun negara yang kita cintai ke

arah yang lebih baik,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi tuan rumah buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR RI di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/5).

Selain Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja juga tampak hadir, antara lain Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Turut

mendampingi Bamsoet, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah.

Hadir juga para pimpinan lembaga negara seperti Ketua BPK Moermahadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial Aidul Azhari, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Kepala PPAK



Foto: Jaka/zod

KA Badaruddin.

Sejumlah tokoh nasional juga hadir seperti Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Kadin Roeslan Roeslani. Turut serta para duta besar negara sahabat seperti Duta Besar Uzbekistan, Duta Besar Maroko, dan Dubes Uni Emirat Arab.

Melanjutkan sambutannya, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan bahwa tak lama setelah Ramadan usai, bangsa Indonesia akan menghadapi Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Selain itu, tahun 2018 ini juga merupakan tahun persiapan menghadapi Pemilu serentak 2019. Karenanya, Ramadan kali ini harus dijadikan momentum untuk selalu menjalin silaturahmi antar sesama anak

bangsa, terlebih diantara para *elite* politik.

Lebih lanjut Bamsuet juga menyampaikan bahwa perbedaan diantara *elite* politik Indonesia harus menjadi rahmat dan bukan sebaliknya. Sebab, adalah sebuah keniscayaan adanya perbedaan diantara kita baik dari suku, ras, golongan, agama, dan bahkan pilihan politik. “Tetapi kesemuanya itu harus dikelola untuk kemaslahatan umat dan rakyat Indonesia,” tutur Bamsuet.

Dengan demikian, Bamsuet meyakini permasalahan intoleransi yang kembali merebak bisa terkikis habis. Intoleransi bukan hanya dalam kehidupan beragama saja, melainkan juga dari berbagai bidang kehidupan lainnya.

“*Elite* politik harus memberikan contoh bagaimana menjalankan toleransi dalam kehidupan. Kita memang berbeda dalam banyak hal, namun tetap bersatu dalam kebersamaan. Ramadan harus menjadi spirit bersatu padu tetapi tidak menghilangkan keanekaragaman” jelas Bamsuet.

Politisi Partai Golkar ini berharap Ramadan memberikan kesempatan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas diri serta menjaga persatuan bangsa. Sepatutnya semua pihak menyadari bahwa bila perpecahan terjadi, akan membuat bangsa lemah tak berdaya.

“Marilah di bulan suci Ramadan ini kita refleksikan sebagai panggilan kepada semua anak bangsa untuk kembali menyatukan hati dan tindakan. Untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kita sendiri,” pungkas Bamsuet.

Seusai buka bersama, dan bersiap meninggalkan kediaman Ketua DPR, Presiden Jokowi menyempatkan menemui awak media dan mengungkapkan isi pembicaraan dengan Bamsuet beserta pejabat negara lainnya.

“Tadi saya, Pak Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua BPK, MA, KY juga satu meja. Kami sepakat, besok kan hari libur. Kita sepakat besok puasa,” seloroh Jokowi yang disambut tawa seluruh wartawan yang telah menunggu sejak sore hari. ■ sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldidi Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Fadli Zon Kritisi Kenaikan THR PNS

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, Polri serta pensiunan PNS. Pasalnya, lebih dari Rp35 triliun anggaran disiapkan guna membayar THR yang akan direalisasikan pada bulan Juni dan Juli tahun ini.

“Kalau memang pemerintah punya dana, kenapa tidak disalurkan kepada tenaga honorer, tenaga harian lepas (THL), penyuluh dan lainnya yang selama ini gaji mereka bahkan ada yang cuma Rp100 ribu per bulan,” ungkap Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, banyak aduan dari masyarakat, terlebih yang berada di daerah, terkait kesejahteraan tenaga honorer. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan dan bersinggungan

langsung dengan masyarakat. Pemerintah sepertinya masih menutup mata terkait permasalahan ini.

“Pemerintah seharusnya bisa memberi kejelasan terhadap status mereka, karena mereka jauh lebih membutuhkan,” tandas Pimpinan DPR Koordinator Politik dan Keamanan itu.

Fadli menilai kuatnya motif politik yang mendasari kebijakan ini.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Foto: Naefurrij/od

Mengingat ini merupakan momen Idul Fitri terakhir, sebelum memasuki tahun politik 2019. “Hal ini sepertinya sudah lumrah terjadi jelang tahun politik, jadi nuansa politik terkait kebijakan kenaikan THR dan gaji ke-13 sangatlah kental,” pungkasnya. ■ es/sf

Agus Hermanto Yakin Pemda Bayar THR Guru Honorer

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yakin Pemerintah Daerah (Pemda) akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada guru honorer. Agar tenaga honorer bisa merasakan kebahagiaan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Agus menilai biaya pendidikan, termasuk honor tenaga pendidik sudah diatur dalam undang-undang. “Bahkan sudah sudah digariskan bahwasannya alokasi anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBN,” terang Agus saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/5).

Ditambahkan Agus, belanja pendidikan juga ada pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diharapkan Pemda memikirkan hal ini, sehingga

Belanja pendidikan juga ada pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diharapkan Pemda memikirkan hal ini, sehingga walaupun tidak sama besarnya dengan yang didapat PNS, guru honorer juga mendapat THR.

walaupun tidak sama besarnya dengan yang didapat PNS, guru honorer juga mendapat THR.

Selain guru honorer, politisi Partai Demokrat ini menilai Pemda juga terikat kewajiban untuk memberikan THR bagi pegawai honorer di instansinya. Kebijakan ini cukup bagus, mengingat negara juga memikirkan masyarakat secara luas terutama yang menyangkut kalangan menengah ke bawah.

Terkait besaran yang diterima tenaga honorer di daerah, politisi dapil Jawa Tengah itu berpendapat jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing dan tidak bisa disamaratakan.

“Kita patut memberi apresiasi kepada pemerintah yang turut memikirkan masyarakatnya. Dan tentunya kebijakan ini juga telah disesuaikan dengan peraturan dan UU yang berlaku,” pungkasnya. ■ es/sf



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Taufik Kurniawan Minta Usut Tuntas KTP-el Yang Tercecer

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta agar permasalahan tercecernya KTP-el di Bogor, Jawa Barat segera diusut hingga tuntas. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu tentang sabotase atas tercecernya KTP-el itu.

“Kalau ini merupakan sabotase, harus diusut dan ditunjukkan kepada publik siapa yang bertanggung jawab,” tegas Taufik saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bila tidak segera ditindaklanjuti, besar kemungkinan akan terulang dan ada kecenderungan

dimanfaatkan untuk kecurangan pada Pemilu. Terlebih lagi dimanfaatkan untuk mendapatkan hak pilih dalam pesta demokrasi, yang sebentar lagi akan digelar di republik ini.

“Jangan dikira cuma KTP-el orang-orang rendah, beliau-beliau itu adalah warga negara kita yang memiliki hak pilih yang sama,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Taufik menambahkan penyalahgunaan

KTP-el untuk kepentingan tertentu juga sangat terbuka lebar. Pemerintah, jangan sampai menganggap kasus ini hal yang biasa-biasa saja. Taufik menduga bahwasanya KTP-el tersebut sengaja disimpan di sebuah gudang.

“Saya melihat beberapa foto terkait KTP-el, di foto tersebut tidak satu kotak saja, melainkan ada banyak. Paspor, buku bank, kartu kredit, kartu ATM kalau sudah tidak berlaku lagi ya dipotong atau digunting. Tapi kok KTP-el, yang katanya sudah tidak berlaku lagi, tidak diapa-apakan, ini kan jadi aneh,” pungkas Taufik.

■ es/sf



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Foto: Jaka/od



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto bersama Pimpinan BAKN terpilih

Foto: Dok./od

Pimpinan DPR Dukung Penuh Keberadaan BAKN

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mendukung penuh keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). BAKN merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat tetap, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“ Untuk lebih mengoptimalkan perannya dalam mengawasi keuangan negara, BAKN bisa merekrut tenaga akuntan, ahli hukum, analisis keuangan atau peneliti sesuai dengan Pasal 112E, UU MD3,” jelas Utut, saat pemilihan Pimpinan BAKN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Politisi Partai Demokrasi Perjuangan ini menambahkan, BAKN yang baru diresmikan pada rapat paripurna beberapa waktu lalu, sesuai dengan amanat UU MD3, akan bermitra dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rapat pemilihan pimpinan BAKN yang langsung dipimpin oleh Utut itu telah memutuskan Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDI-Perjuangan

sebagai Ketua BAKN, sementara Andi Ahmad Dara dari Fraksi Partai Golkar dan Wilgo Zainar dari Fraksi Partai Gerindra, masing-masing sebagai Wakil Ketua BAKN.

Andreas menegaskan BAKN akan

Dalam pengelolaan keuangan negara, banyak hal yang banyak menjadi sorotan BAKN. Salah satu contohnya adalah biaya pendidikan 20 persen dari APBN, tetapi hasilnya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

menjalankan amanat UU MD3 dengan sebaik-baiknya. “Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta hak DPR RI di bidang keuangan negara, sehingga bisa lebih transparan dan akuntabel sehingga, akan menopang terwujudnya kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Dalam pengelolaan keuangan negara, banyak hal yang banyak menjadi sorotan BAKN. Salah satu contohnya adalah biaya pendidikan 20 persen dari APBN, tetapi hasilnya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Ditambahkan Andreas, nantinya BAKN juga mengawasi keuangan negara sampai ke daerah. “Kita juga akan melihat sejauhmana efektifitas dari transfer ke daerah termasuk juga Dana Desa. Karena setiap tahun dana yang ditransfer ke desa

ini semakin besar nilainya,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.

“Intinya dengan adanya BAKN, maka temuan dari BPK itu bisa segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait melalui komisi yang menjadi mitra kerja masing-masing lembaga tersebut,” jelas Andreas.

Dalam kurun waktu yang singkat, BAKN akan menggelar rapat bersama Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) yang sudah ada di Badan Keahlian (BK) DPR RI. Diharapkan minggu depan, BAKN sudah mempunyai fokus kegiatan yang akan dilakukan kurun waktu 2018 sampai 2019.

Awalnya BAKN dibentuk pada tahun 2014, berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) huruf (F) dan Pasal 110-116 UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2009.

Namun, BAKN terlikuidasi karena dihapusnya Pasal 83 Ayat (1) huruf (F) pada UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 yang disahkan pada 5 Agustus 2014, karena Alat Kelengkapan Dewan ini dinilai tidak bekerja optimal dalam mengawasi keuangan negara. Namun pada UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3 mengamanatkan kembali dihidupkannya BAKN DPR. ■ es/sf



Foto: Doeh/00

Pimpinan DPR RI menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan Komisi III DPR RI

Erma Suryani Jadi Wakil Ketua Komisi III

Erma Suryani Ranik (F-PD) resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Benny K. Harman yang sudah mengundurkan diri. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin pelantikan Erma di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Hadir dalam acara pelantikan, Kamis (24/5) itu, Ketua DPR RI yang juga mantan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III Kahar Muzakir dan Wakil Ketua Komisi III Desmon J.

Mahesa juga ikut menyaksikan. Fadli Saat memimpin rapat, meminta persetujuan anggota Komisi III yang hadir. Semua unsur Pimpinan dan Anggota menyatakan setuju Erma menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III.

Erma dalam sambutannya mengatakan, terima kasihnya telah dipercaya menempati jabatan baru. Ia berharap bisa tetap bekerja sama dengan semua anggota Komisi III. "Masih banyak proses legislasi yang harus segera diselesaikan dan itu butuh kerja sama erat para Anggota Komisi III," ujar Erma.

Sementara itu usai melantik, Fadli berharap kehadiran Erma di kursi Pimpinan Komisi III semakin memperkuat kinerja pengawasan terhadap eksekutif. ■ mh/sc



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

Foto: Arief/od

DPR Harap Presiden Segera Bentuk Aturan Pendukung UU Antiterorisme

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberi catatan kepada Presiden, agar secepatnya mempersiapkan aturan-aturan fungsi dan peran para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terorisme, agar tidak berbenturan dan juga tidak *overlap* dengan badan yang sebelumnya sudah ada.

“Alhamdulillah, Pansus DPR RI bisa menyelesaikan RUU Antiterorisme lebih cepat. Semoga langkah pemerintahan Jokowi juga bisa segera dengan mempersiapkan aturan

pendukung UU ini, seperti Peraturan Presiden dan turunannya sehingga penegakan hukum dan pelibatan semua komponen untuk mencegah dan menindak terorisme segera terbit,” ujar Kharis dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (28/5).

Anggota Fraksi PKS ini menekankan bahwa aturan pendukung tersebut nantinya adalah untuk memastikan

kembali sejauh mana pelibatan TNI yang kemudian turut diatur dalam UU Antiterorisme ini, mengingat aksi terorisme semakin membahayakan masyarakat dan negara.

“Sebagaimana diatur pada pasal 43 (i) bahwa TNI dapat dilibatkan ketika kualitas dan kuantitas teror sudah sistematis, bersenjata, dan membahayakan negara dan masyarakat,”

Jelang Pilkada, Komisi II Minta Kemendagri Selesaikan Permasalahan KTP-el

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas upaya yang dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Namun ia meminta kepada Kemendagri untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih mejadi catatan dari Komisi II, yaitu terkait permasalahan KTP-el.

“Terhadap permasalahan pendataan dan perekaman KTP-el, kami meminta Kemendagri terus mengejar bola untuk melakukan perekaman KTP-el untuk pemilih yang belum terekam, agar dapat terakomodir hak pilihnya,” jelasnya saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, upaya perekaman KTP-el harus dilakukan semaksimal mungkin, agar pada akhir Desember 2018 jumlah pendataan dan perekaman mendekati 100 persen.

“Berdasarkan data Dirjen Dukcapil, masih ada 161.24 ribu warga yang melakukan perekaman. Kita harap pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan ini, karena



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Foto: Rumi/od

faktor penentu keberhasilan pemilu itu ya pemilih,” jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan gambaran umum mengenai persiapan yang telah dilakukan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Mulai dari anggaran Pilkada, personel pengamanan,

tutur Kharis.

Kharis berharap pelibatan TNI itu nantinya juga diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang bersinergi dengan UU Antiterorisme yang baru.

“Pengaturan ini penting untuk memastikan keterlibatan TNI ini terukur dan terarah, dengan target yang jelas, detail siapa, apa, dimana, berapa dan sejauh mana penggunaan satuan-satuan di dalam TNI yang dilibatkan, apakah satuan khusus atau bagaimana, peraturan itu diharapkan detail dan jelas, jadi terukur, jangan menepuk nyamuk dengan meriam,” imbuh Kharis.

Di sisi lain, politisi dapil Jawa Tengah ini juga mengapresiasi hasil kerja tim pansus yang telah bekerja keras menyelesaikan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, atau dikenal dengan RUU Antiterorisme. Untuk itu, selanjutnya ia meminta agar pemerintah secepatnya mempersiapkan aturan pendukung UU tersebut. ■ *eps/sf*

konstelasi Pilkada 2018, daerah yang diprediksi rawan konflik, fase hoaks, dukungan penyelenggara dengan pembentukan *desk* Pilkada di tingkat provinsi, sengketa penyelenggara pilkada, netralitas ASN, hingga tentang kerja sama antar *stakeholder* dalam Pilkada 2018 menjadi pembahasan dalam rapat.

“Kami yakin target partisipasi pemilih tahun 2018 meningkat hingga 78 persen dari sebelumnya tahun 74 persen di tahun 2015. Sementara untuk anggaran Pilkada totalnya Rp19,114 triliun dan sudah terealisasi Rp14,317 triliun. Personel pengamanan terselenggaranya Pilkada, Polisi 184.013 personel, TNI 99.599 personel dan Linmas 823.738 personel, sehingga totalnya 1.107.310 personel,” jelasnya.

Sementara mengenai masalah KTP-el, pihaknya optimis 90 persen dapat segera selesai. Prinsip untuk permasalahan KTP-el sebagaimana amanat UU memang tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melayani. “Kami terus berupaya dengan keterbatasan mesin dan SDM. Kami juga minta masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk pro aktif,” tutupnya. ■ *rnm/sf*



Foto: Jayadi/od

Anggota Komisi IV DPR RI Felicitas

Legislator Dukung Bulog Pasarkan Beras Sachet Ukuran 200 Gram

Anggota Komisi IV DPR RI Felicitas mendukung penuh rencana Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog yang akan mendistribusikan beras dalam bentuk sachet. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum dimulainya RDP Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

“Saya pribadi mendukung Dirut Bulog yang akan membuat dan mendistribusikan beras dalam ukuran sachet (saset) ke seluruh Indonesia,” ujar Felis, begitu ia biasa disapa.

Pasalnya, menurut Felis, beras dalam bentuk sachet tersebut akan memberikan pilihan ukuran yang lebih variatif kepada masyarakat. Selain itu, beras sachet juga diyakini akan mampu menekan ruang gerak mafia pangan yang selama ini ada.

Sementara itu Buwas kepada wartawan menjelaskan bahwa beras sachet dengan ukuran 200 gram atau yang setara dengan tiga piring nasi itu dinilai mampu menekan dominasi para kartel pangan di Indonesia. Dengan penyebaran yang baik, ia meyakini celah para mafia pangan dalam memainkan penyebaran beras akan mampu dihentikan.

“Perum Bulog akan menjual Beras sachet dengan ukuran 200 gram atau yang setara dengan tiga piring nasi, harganya dua ribu lima ratus rupiah. Kalau punya uang Rp10 ribu bisa dapat empat sachet,” jelas Buwas sambil memastikan bahwa kualitas beras tersebut tetap dalam mutu dan kondisi yang baik.

Rencananya pekan depan, Bulog akan mulai memasarkan beras sachet yang diberi label Beras KITA tersebut melalui koperasi BUMN dan beberapa toko. ■ *ayu/sc*

“Sekarang kita bertatap muka, kami mengundang semua *stakeholders*, termasuk perusahaan, dan masyarakat. Kita ajak semua untuk menyampaikan keluhan kesah dan permasalahan yang ada di lapangan,” kata Edhy saat memimpin jalannya pertemuan, Jumat (25/5) sore.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Dirjen Planologi, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen Kehutanan Sosial, Dirjen Perkebunan dari Pertanian, Wakil Bupati Musi Rawas dan Direksi PT. Lonsum. “Kita undang semuanya, agar masalah ini bisa segera selesai dan ada tindak lanjutnya. Jangan hanya sampai di meja saja,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Diketahui permasalahan yang sudah berjalan 3 tahun ini adalah mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun plasma yang belum terpenuhi oleh perusahaan sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2004. Kemudian, perambahan hutan kawasan yang beralih fungsi menjadi kelapa sawit, dan verifikasi perusahaan yang menyatakan kebun plasma seluas 272 hektar sesuai pembahasan RDP dengan Komisi IV DPR RI, 12 Februari 2018 lalu.

“Setelah pertemuan ini, Komisi IV akan meminta Dirjen-dirjen terkait untuk memetakan masalah-masalah ini, kemudian baru kita ambil langkah selanjutnya dan kita panggil lagi kedua belah pihak dan Pemerintah Daerah untuk kita ambil keputusan,” tandas politisi dapil Sumsel itu.

Menutup pertemuan tersebut, Edhy mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri, jangan emosi dan tidak



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

Foto: Kresno/od

Komisi IV Jembatani Konflik PT. Lonsum Dengan Masyarakat

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menjembatani konflik atau permasalahan yang terjadi antara PT. London Sumatera (PT. Lonsum) dengan masyarakat di Desa Muara Megang, Kecamatan Magang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

melakukan tindakan anarkis. “Biar bagaimanapun, perusahaan itu adalah pilar ekonomi. Tanpa pengusaha, negara tidak akan hidup ekonominya. Investor

juga harus kita ingatkan, kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, lebih baik kita suruh pergi saja,” tutup Edhy.

■eno/sf



Foto: Andri/od

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto

Wakil Ketua Komisi VI Apresiasi Peran BUMN Stabilkan Harga Pangan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi peran BUMN stabilkan harga dan ketersediaan pangan menjelang lebaran. Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Pasar Sentral, Medan, Sumatera Utara, baru-baru ini.

Pemanfaatan teknologi informasi pada semua sektor adalah sebuah keniscayaan, tak terkecuali penyelenggaraan transportasi. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan transportasi daring atau *online*, khususnya Roda Dua (R2) menimbulkan banyak kegaduhan di Tanah Air.

Dalam praktiknya, selama ini aplikasi telah memosisikan sebagai perusahaan transportasi, namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengatur keberadaan transportasi *online*. Karenanya, Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan transportasi *online* agar tidak berlarut-larut.

“Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan melakukan pengaturan agar perusahaan aplikasi yang bergerak pada sektor transportasi dapat mematuhi seluruh peraturan di bidang transportasi angkutan sewa khusus,” ungkap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/5).

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, Komisi V bersama

“**“** Harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan kali ini cenderung stabil dan masih terjangkau oleh masyarakat. Kami apresiasi hal itu. Sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya di bulan Ramadhan serta mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dito melalui keterangan tertulisnya.

Dijelaskannya, dari hasil sidak pasar, ditemukan bahwa harga beras, daging, gula, dan minyak goreng masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan harga ayam, telur, bawang putih dan merah, cabe, tomat, dan beberapa kebutuhan lainnya berada di bawah harga



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy dan Menteri Perhubungan

Foto: Jaka/od

Komisi V Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Transportasi *Online*

pemerintah mewajibkan perusahaan aplikasi yang bergerak di sektor transportasi untuk mentaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang transportasi angkutan

acuan pemerintah.

Tidak hanya itu dari laporan Badan Urusan Logistik (Bulog), ketersediaan dan harga kebutuhan pangan dipastikan terkendali. Bulog juga terus memonitor dan mempersiapkan pasokan jika stoknya berkurang.

Hal itu menurut Dito membuktikan bahwa BUMN benar-benar hadir untuk masyarakat. Meski demikian, ia juga berharap agar masyarakat juga ikut mengawasi ketersediaan pangan dapat terus terjaga dengan baik, hal itu semata demi kebaikan bersama. ■ ayu/sc

sewa khusus. Implikasinya, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri harus melakukan penegakan hukum termasuk terhadap transportasi daring (dalam jaringan) sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan, saat ini pemerintah sedang menyusun kajian mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan sepeda motor (R2). Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan dengan kehati-hatian karena memiliki kompleksitas masalah serta menyangkut hidup orang banyak, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama dan melibatkan banyak pihak.

Menhub Budi menambahkan, hal-hal yang akan diatur dalam penyusunan kajian tersebut, antara lain; persyaratan teknis, perizinan, kategori kompetensi pengemudi, wilayah operasi, perencanaan kebutuhan jumlah kendaraan, waktu operasi, tarif, hingga Standar Pelayanan Minimum (SPM). ■

ann/sf



Foto: Anne/oc

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali bersama Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau PT. HM Sampoerna Tbk

Industri Nasional Diharapkan Ramah Lingkungan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali menegaskan, sektor industri berperan penting dalam perekonomian nasional. Sektor industri masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan capaian 20,16 persen pada tahun 2017. Namun, perkembangan industri juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Kami bercita-cita, industri Indonesia ini harus mengarah pada industri yang ramah lingkungan, industri berkelanjutan yang punya kepedulian terhadap alam sekitar,” ungkap Syaikhul saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. HM Sampoerna Tbk di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (26/5). Turut hadir dalam kunker ini, Anggota Komisi VII Kurtubi (F-NasDem), Ridwan Hisjam (F-Golkar) dan Ihwan Datu Adam (F-Demokrat).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Politisi F-PKB ini mengatakan hanya 150 perusahaan di Indonesia yang berhasil meraih Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Hijau. Sementara,

yang mendapatkan Proper Emas hanya 19 perusahaan, Proper Biru 1.486 perusahaan, dan Proper Merah sebanyak 130 perusahaan. “Kita mendorong semua perusahaan meningkatkan capaian proper itu, yang merah menjadi biru, yang biru menjadi hijau,” katanya.

Sementara dari sisi regulasi, menurutnya masih dibutuhkan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) agar bisa lebih implementatif di lapangan.

“Sebenarnya pengelolaan limbah dan sanksi sudah diatur, khususnya limbah B3. Tetapi, beberapa tempat yang kita kunjungi mendapatkan proper hijau, tapi

sebenarnya tidak layak. Ada yang proper biru, tetapi tidak sebenarnya pengelolaan polusi udaranya tidak bagus. Karena itu, kami juga mendorong KLHK meningkatkan kinerja dengan baik,” jelasnya.

Politisi dapil Jawa Timur I ini menambahkan, upaya menuju industri ramah lingkungan atau industri hijau harus segera dimulai, efisiensi terhadap penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga mampu terus bersaing di pasar global. Selain itu, hal ini merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mengurangi perubahan iklim dengan meningkatkan energi terbarukan dan pengelolaan hutan dan lahan.

Secara umum, industri hijau memiliki karakteristik antara lain, menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan, menerapkan *reduce, recycle, reuse*, dan *recovery* pada proses produksi, menggunakan intensitas energi dan air yang rendah, meminimalkan limbah, serta menggunakan teknologi rendah karbon.

■ ann/sf

Komisi VII Fasilitasi Persoalan Izin Revitalisasi Teluk Benoa

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI M. Dardiansyah menyatakan akan memfasilitasi PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) terkait pengajuan izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan revitalisasi Teluk Benoa, di Bali.

Perjuangan ini.

Jika sudah tidak ada masalah dengan masyarakat, lanjutnya, tentu pemerintah harus mendukung hal itu apalagi tujuannya untuk kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat. “Saya berharap kepada perusahaan harus mengerti terhadap kultur dan budaya masyarakat Bali,” tambahnya.

Ia menginformasikan, bahwa informasi dari PT. TWBI yang mengajukan izin revitalisasi Teluk Benoa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mempertimbangkan dan mempelajari melalui studi Amdal, dan melakukan pemeliharaan hutan bakau. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengeluarkan izin AMDAL. ■ man/sc

Secara prosedur dan perundang-undangan belum selesai dan masih ada penolakan dari masyarakat, sehingga dari pemerintah mempertimbangkan hal tersebut. Tentunya kita akan membantu memfasilitasi antara PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apa saja permasalahannya sehingga izin AMDAL tidak diterbitkan,” paparnya dalam pertemuan di Kantor

Pelindo III Benoa, Bali, Sabtu (26/5).

Namun sebelum izin dikeluarkan, Dardiansyah meminta PT. TWBI diminta melakukan pendekatan kepada masyarakat, sesuai kultur Bali. “Perusahaan harus berniat benar-bener melakukan pendekatan bagaimana terhadap kultur Bali yang ada di Provinsi Bali, karena sosial budaya yang ada di Bali sangat kental jadi mau tidak mau dia harus selesaikan permasalahan itu dengan masyarakat,” papar Politisi PDI



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI M. Dardiansyah

Komisi VII Pastikan PT IKPP Laksanakan Aturan UU

Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan terjadinya pencemaran yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Terkait adanya laporan dari warga masyarakat mengenai kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh Perusahaan Bubur Kertas PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang beroperasi di Kabupaten Siak, Riau, Komisi VII DPR RI tergerak untuk menggelar pertemuan dengan pihak Direksi PT. IKPP guna memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan semua aturan perundang-undangan yang berlaku.



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

Foto: Devi/od

“Kami ingin memastikan bahwa dalam melakukan aktivitas produksinya, PT. Indah Kiat Pulp and Paper telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) termasuk aturan pelaksanaannya,” ucap Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/5).

Gus Irawan juga mengatakan, Komisi VII DPR RI ingin memperoleh informasi dan penjelasan PT. IKPP, terutama yang terkait dengan perbandingan volume produksi dengan limbah B3 yang dihasilkan, serta sejauh mana implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp and

Paper bagi masyarakat sekitarnya.

“Kami berharap, pihak PT. Indah Kiat Pulp and Paper dapat semakin meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidupnya. Sehingga keberadaan PT. Indah Kiat Pulp and Paper dapat berkontribusi tidak hanya dari sisi pendapatan dan perekonomian masyarakat sekitar, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik,” tandasnya.

Untuk menghindari terjadinya kontaminasi pencemaran akibat limbah industri kepada penduduk di sekitar lokasi perusahaan, Gus Irawan menyatakan harus dicarikan solusi terbaik terhadap hal tersebut. “Misalnya, lokasi keberadaan sebuah pabrik itu

harus jauh dari pemukiman penduduk, supaya dampak paparannya tidak terlalu besar,” ucap Politisi Fraksi Gerindra itu.

Komisi VII juga mendorong agar *proper* penilaian terkait lingkungan PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang saat ini masih dalam nilai biru dapat meningkat ke tahap nilai hijau.

“Padahal dengan berbagai program CSR yang telah mereka lakukan, semestinya bisa dioptimalisasi memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dan mestinya bisa meningkat ke hijau. Kita berharap hal ini dimonitor terus oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena masalah lingkungan merupakan persoalan yang sangat penting bagi masyarakat,” pungkasnya.

■ dep/sc



Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw

Foto: Andri/od

Komisi IX dan Menkes Bahas Urun Biaya Kesehatan

Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan menggelar rapat kerja untuk membahas soal urun biaya pada pelayanan kesehatan. Urun biaya merupakan tambahan biaya yang dibayar oleh peserta kepada fasilitas kesehatan (faskes) saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan.

Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw mengatakan, pembahasan tentang urun biaya ini karena terjadi defisit pada pembiayaan kesehatan. “Saya ingatkan bahwa, kenapa kita tiba-tiba

bicara tentang urun biaya, saya ingin sampaikan bahwa ini semua karena ada defisit yang besar,” papar Roberth saat raker di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Urun biaya diberlakukan apabila

Komisi VIII DPR dan Menteri Agama sepakat asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam BPIH 2018 berubah dari SAR 1 = Rp3.570 menjadi SAR 1 = Rp3.850. Dengan kenaikan kurs tersebut, maka dana optimalisasi haji tahun 2018 berubah dari Rp6,327 triliun menjadi Rp6,878 triliun.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Menurut Ali Taher, akibat kenaikan kurs tersebut, Komisi VIII menyetujui kenaikan dana optimalisasi haji sebesar Rp 580,990 miliar. Kenaikan tersebut dipicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini mencapai Rp14.204 per dolar AS.

Dalam Raker yang beragenda Perubahan Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2108 ini, Komisi VIII juga menyetujui usulan Kemenag mengenai *Indirect Cost* BPIH Khusus tahun 2018 sebesar Rp16,690 miliar.

Selain itu, Komisi VIII bersama Menag dan BPKH sepakat bahwa penyediaan SAR dalam rangka BPIH 2018 meliputi, penyediaan SAR dalam rangka pembayaran *living cost* dilakukan

tindakan yang dilakukan atas permintaan penerima manfaat yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Urun biaya bertujuan untuk menghindari terjadinya *moral hazard*. Roberth menekankan kepada pemerintah apapun kondisinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena layanan kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Bicara pelayanan kesehatan itu adalah amanat undang-undang dan konstitusi kita, jadi tidak boleh kita mundur lagi,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Menurutnya pemerintah tidak boleh membebani rakyat, karena pelayanan kesehatan adalah tanggung



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong

Foto: Arrief/od

Dana Optimalisasi Haji 2018 Jadi Rp6,878 Triliun

Kemenag, dengan pertimbangan BPKH belum memiliki pejabat pengadaan yang bersertifikat. Di sisi lain, penyediaan SAR dalam rangka operasional haji di Arab Saudi dilakukan oleh BPKH.

“Untuk itu Komisi VIII DPR mendesak Menteri Agama untuk mempercepat Keputusan Presiden mengenai besaran *indirect cost* BPIH 2018,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII menyetujui agar BPKH menggunakan nilai manfaat setoran awal jemaah haji untuk uang muka pembayaran *indirect cost* BPIH 2018 kepada Kemenag RI,

sebelum terbitnya Keppres. Kepada BPKH, Komisi VIII minta bersama Kemenag untuk menyusun kebijakan mengenai penyediaan mata uang SAR, guna mengantisipasi fluktuasi nilai tukar, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

Ditambahkan Ali Taher, saat ini kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Dengan demikian melalui dana optimalisasi tersebut, pemerintah mensubsidi Rp31 juta per jemaah. Saat ini biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada jemaah ialah Rp 34,5 juta. ■ mp/sf

jawab pemerintah. “Ini tanggung jawab pemerintah. Nah sekarang bagaimana kebijakannya untuk menanggung itu. Pemerintah harus mencari dana untuk menanggung itu. Bukan mengembalikan ini untuk menekan masyarakat dengan alasan urun biaya,” kritis Roberth.

Sementara itu di lain pihak, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek memaparkan, jenis pelayanan yang diusulkan oleh BPJS Kesehatan untuk dikenakan urun biaya antara lain, pelayanan katarak, pelayanan rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan masa melahirkan. Dia mengungkapkan persoalan ini akan dibahas dan dikaji oleh organisasi profesi bersama Kemenkes yang kemudian ditetapkan oleh menteri.

Kebijakan urun biaya ini berdasar

pada Pasal 22 UU Nomor. 40 tentang SJSN. Dalam ayat 2 berbunyi; ‘Jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang membuka peluang *moral hazard* (sangat dipengaruhi selera dan perilaku peserta), misalnya pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik’.

Dalam aturan ini juga disinggung bahwa, urun biaya harus menjadi bagian upaya pengendalian, terutama upaya pengendalian dalam menerima pelayanan kesehatan. Penetapan urun biaya dapat berupa nilai nominal atau persentase tertentu dari biaya pelayanan, dan dibayarkan kepada fasilitas kesehatan pada saat peserta memperoleh pelayanan kesehatan. ■ eko/sf

Antisipasi Aksi Terorisme, Komisi X Minta Pengamanan Asian Games Diperketat

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah memperketat pengamanan Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Sumatera Selatan pada Agustus mendatang. Hal ini menyusul maraknya aksi teror bom yang dilakukan teroris di beberapa titik di wilayah Indonesia, akhir-akhir ini.

“Maraknya teror bom membuat kita harus lebih waspada, jangan sampai kita kecolongan. Jika sampai Asian Games ini ada insiden bom, tentu akan mencoreng nama Indonesia di dunia internasional. Untuk itu saya meminta kepada Inasgoc, selaku panitia Asian Games, untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan,” kata Sutan, di

Faktor keamanan merupakan hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan panitia penyelenggara Asian Games. Pasalnya, pesta olahraga terbesar se-Asia itu berpotensi menjadi sarana untuk menjalankan aksi terorisme

sela-sela rapat kerja dengan Menpora, INASGOC, dan INAPGOC di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/5).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, faktor keamanan merupakan hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan panitia penyelenggara Asian Games. Pasalnya, pesta olahraga terbesar se-Asia itu berpotensi menjadi sarana untuk menjalankan aksi terorisme. Sehingga, Indonesia sebagai tuan rumah, harus meningkatkan kewaspadaan. Namun di sisi lain, Sutan yakin Polri, TNI, maupun aparat keamanan terkait lainnya bisa melakukan tugasnya secara baik.

Pemerintah Diminta Buat Terobosan Tanggulangi Masalah Sarpras Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat langkah terobosan dalam menanggulangi masalah sarana prasarana (sarpras) pendidikan yang rusak di seluruh Indonesia. “Problemnya cukup kompleks dan meliputi diskursus kewenangan pusat-daerah karena terkait desentralisasi pendidikan, sehingga saya lihat butuh Perpres,” ujar Fikri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Lebih lanjut Fikri mengatakan, Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di Komisi X DPR sudah berjalan sejak tahun lalu dan menemukan 75% ruang kelas di seluruh Indonesia itu rusak. “Hasil rekomendasi Panja



Foto: Naeuroji/od

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih



Foto: Naefurji/od

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra bersama Menpora Imam Nahrawi

“Dalam hal ini, saya pikir kita percaya akan profesionalitas Polri maupun TNI dalam melakukan pengamanan. Tinggal bagaimana kita, khususnya Inasgoc bisa berkoordinasi secara baik dalam mengantisipasi aksi teror yang mungkin terjadi,” imbuh Sutan.

Menurut Sutan, *event* Asian Games 2018 bukan hanya masalah sukses atau tidaknya penyelenggaraan, tetapi menyangkut aspek kepercayaan internasional. Jika Asian Games berjalan sukses, maka akan memicu investasi, perputaran ekonomi, hingga pariwisata. Dan semua itu membutuhkan kondisi keamanan yang terjaga.

“Kita percayakan ini pada Polri, TNI maupun aparat terkait lainnya, sehingga Asian Games 2018 menjadi momentum kebangkitan bangsa melalui *event* olahraga,” harap politisi dapil Jambi itu. ■ sf

juga sudah diserahkan ke menteri,” tuturnya.

Hasil rekomendasi Panja Sarpras menyatakan tentang perlunya pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas di seluruh Indonesia, sambungnya. “Regulasi diperlukan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak, yang totalnya mencapai 1,3 juta kelas atau 75 persen dari jumlah ruang kelas di seluruh Indonesia,” papar Politisi Fraksi PKS itu.

Fikri menjelaskan bahwa regulasi tersebut juga perlu memuat teknis penggunaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan agar tepat waktu, prosedural, serta taat hukum.

“Regulasi harus mengatur mengenai kebijakan anggaran, manajemen, pelaksanaan, pengawasan dan sinkronisasi Dapodik dengan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.

Ia mengatakan, sumber pendanaan untuk perbaikan ruang kelas rusak selama ini bersumber dari anggaran Kemendikbud dan dana transfer ke daerah berupa DAK Pendidikan. Ironisnya, porsi anggaran pendidikan dalam APBD, baik yang dialokasikan dari pusat maupun dari daerah sendiri, masih jauh dari ketentuan Undang-Undang sebesar 20 persen.

“Menurut data neraca pendidikan daerah yang dikeluarkan Kemendikbud, pada 2016 hanya Provinsi DKI Jakarta

yang melampaui ketentuan, yakni anggaran pendidikan sebesar 22 persen dari APBD. Namun 33 provinsi sisanya masih di bawah 10 persen, bahkan hanya 1,4 persen di Papua,” terangnya.

Dikatakannya, data dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan juga tak kalah mengejutkan. Anggaran Pendidikan RI di tahun 2017 itu mencapai Rp419 triliun. Rp261 triliunnya untuk transfer ke daerah, sedangkan Rp155 triliunnya digunakan untuk kementerian/lembaga seperti Kemenristekdikti dan Kemenag.

“Namun faktanya, dari Rp261 triliun tadi, 94,6 persennya (atau Rp247 triliun) itu untuk gaji dan tunjangan. Sehingga porsi belanja modal untuk pembangunan,

Hasil rekomendasi Panja Sarpras menyatakan tentang perlunya pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas di seluruh Indonesia, sambungnya. “Regulasi diperlukan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak, yang totalnya mencapai 1,3 juta kelas atau 75 persen dari jumlah ruang kelas di seluruh Indonesia

renovasi dan rehabilitasi gedung sekolah hanya tinggal sisanya saja, belum dibagi untuk masing-masing jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK,” urai Fikri.

Maka ada yang menghitung matematis, bahwa untuk mencukupi rehabilitasi 1,3 juta ruang kelas rusak itu butuh waktu 10 tahun. “Ini lama sekali, jangan-jangan keburu rubuh semua, baru dana terkumpul,” ujarnya.

“Pembagian urusan administrasi antara provinsi dan kabupaten/kota juga memperumit masalah. Sebagaimana diketahui, satuan pendidikan setingkat SMA & SMK di bawah administrasi pemerintah provinsi, sedangkan satuan pendidikan setingkat SD & SMP di bawah kabupaten/kota. Setiap wilayah administratif pasti berbeda-beda lagi kebijakannya,” imbuh Fikri.

Oleh karenanya dibutuhkan satu payung hukum yang bersifat lintas koordinatif untuk menata ulang pengelolaan anggaran pendidikan, utamanya rehabilitasi sarana prasarana pendidikan agar merata dan berkesinambungan di seluruh Indonesia, jelas Fikri.

“Masalah Sarpras Pendidikan sudah menjadi masalah nasional yang berimbas pada kualitas masa depan anak bangsa, sudah seharusnya menjadi prioritas Presiden Jokowi saat ini,” pungkasnya. ■ dep/sc



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir bertukar cenderamata dengan mitra kerja

Komisi XI Apresiasi Pengendalian Inflasi Sumbar

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan, perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 5 persen (year of year) pada triwulan I tahun 2017. Namun pada triwulan I tahun 2018, ekonomi Sumbar tumbuh melambat ke level 4,71 persen (yoy). Menurutnya, angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi triwulan I yang terendah sejak tahun 2013 dan berada di bawah nasional.

Hal itu diungkapkan Hafisz saat memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Pemerintah Daerah Sumbar, di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Padang, Senin (28/5).

Kunker ke Sumbar ini dalam rangka pengawasan perkembangan ekonomi serta pengendalian inflasi daerah pada masa Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

“Walau pertumbuhan menurun di awal semester, tapi inflasi hingga bulan April

2018 masih terjaga pada level rendah yaitu sebesar 0,69 persen (year to date) dan hingga akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 3,51 persen (yoy). Ini hasil kerja keras dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Pemerintah Daerah serta seluruh *stakeholder* yang dapat mengendalikan inflasi daerah dengan menekan *volatile food-nya*,” jelas Hafisz.

Politisi PAN itu pun mendorong TPID harus diperkuat fungsi dan kewenangannya. Menurutnya, TPID seharusnya dapat mengintervensi pasar melalui operasi pasar, bukan hanya sekedar memantau inflasi dengan kewenangan redistribusinya. “Inflasi



Foto: Guntur/zod

menjadi momok bagi perekonomian kita, dan ini tugas kita bersama untuk mengendalikannya,” imbuh Hafisz.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar melihat bahwa inflasi yang terjadi di Sumbang banyak dipengaruhi oleh *supply and demand* daripada produk yang mempunyai *administrated prices*, yaitu harga produk yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat terhadap tarif listrik, BBM, tarif pesawat terbang, Organda, dan LPG serta gas, membuat inflasi menjadi sulit diintervensi.

“Pemerintah harus hadir dan menjaga stabilitas inflasi daerah ini, karena inflasi ini mencuri kekayaan rakyat. Inflasi menyebabkan faktor angka kemiskinan melebar, karena masyarakat terbebani oleh biaya yang lebih tinggi daripada pendapatan mereka,” tandas politisi Partai Gerindra itu. ■ **gd/sf**



Foto: Hendra/zod

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

DPR Minta BI Jadikan Pangkep Sebagai Klaster Binaan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi semangat masyarakat Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dalam mengelola budidaya ikan bandeng. Hal ini pun bermanfaat dalam menekan laju inflasi di Sulsel. Karenanya, ia pun meminta Kabupaten Pangkep ini menjadi klaster binaan Bank Indonesia (BI).

“Kabupaten Pangkep adalah salah satu yang berpotensi dalam pengembangan ikan bandeng. Meski disampaikan ada banyak kendala seperti alam, tanah, air dan pakan bibit dan pemasaran,” ujar Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Pangkep, Sulsel, Senin (28/5).

Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini meminta kepada BI agar Kabupaten Pangkep ini jadi klaster dalam pembinaan BI. “Kita tadi dalam kesimpulan dialog meminta BI agar Pangkep ini jadi klaster dalam pembinaan BI. Mengenai produknya mau bandeng atau udang, ya nanti kami serahkan hasil komunikasi BI dengan masyarakat,” tutur Marwan.

Marwan mengingatkan agar pemilihan produk dalam binaan BI memperhatikan aspek *sustainable*, artinya bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Produk dipilih atau mendapat pendampingan dari awal sampai akhir ini bisa menjadi gantungan hidup masyarakat paling tidak lima sampai sepuluh tahun mendatang.

“Kita tidak ingin bangun komoditas yang saat ini harganya bagus, tapi tiga tahun berikutnya anjlok. Kita harapkan bagaimana komoditas yang dipilih

bisa *sustainable* dalam jangka panjang,” sambungnya.

Meski demikian, Marwan juga meyakini bahwa jika budi daya ikan bandeng ini dikelola secara maksimal, baik dari segi pengolahan hingga pemasaran akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kabupaten Pangkep. Hal ini terbukti bahwa budi daya ikan bandeng mampu menekan inflasi yang baik untuk Kabupaten Pangkep dan Sulsel.

Marwan juga mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu bekerja secara maksimal di Sulsel. “Kalau koordinasi TPID sudah cukup baik ya. Tapi kita perlu lihat langsung supaya tahu suasana psikologisnya. Kalau kita turun langsung ke lapangan, kita tahu langsung,” tutup politisi dapil Lampung itu.

Masyarakat yang hadir dalam kunker Komisi XI DPR RI dalam rangka pengawasan laju inflasi daerah ini turut mengapresiasi atas perhatian DPR dan dukungannya agar Kabupaten Pangkep menjadi klaster binaan BI. Hal ini cukup bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkep, dengan komoditas bandeng yang mempunyai andil inflasi terbesar, atau 0,46 persen *year of year* (yoy). ■ **hs/sf**



Foto: Dok.BKSAP/od

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Juliar P. Batubara memimpin delegasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Austria

Indonesia - Austria Ingin Kembangkan Kerja Sama

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliar P. Batubara memimpin delegasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Austria guna meningkatkan neraca perdagangan bilateral kedua negara. Diharapkan, hubungan Indonesia - Austria yang sudah terjalin sejak 1954, baik dalam bidang politik maupun ekonomi semakin meningkat.

Ari, panggilan akrab Juliar memaparkan, hubungan Indonesia dengan Austria sejak lama telah ditandai dengan peningkatan kunjungan di tingkat pemerintah dan parlemen. Dalam bidang politik, kedua negara saling mendukung dalam pencalonan wakil di badan PBB dan organisasi internasional lainnya.

“Sebagai contoh, Austria mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Sebaliknya Indonesia juga mendukung pencalonan Austria sebagai anggota tidak tetap PBB 2027-2028,” papar Juliar, di Wina, Austria, Selasa (22/5). Kunjungan itu juga diikuti oleh Wakil Ketua BKSAP Rofi’ Munawar serta 12 anggota BKSAP

lainnya.

Ari menambahkan, di bidang ekonomi, Indonesia mengekspor furnitur, kerajinan tangan dan bahan mentah. Sedangkan impor Indonesia dari Austria antara lain mesin dan suku cadang kendaraan, elektronik, produk olahan dan produk kimia.

Sementara, di bidang pariwisata, ia juga menjelaskan situasi dan kondisi terkini dalam negeri terkait isu terorisme. Menurutnya, keamanan Indonesia tetap terkendali, sehingga aman untuk dikunjungi.

Tak hanya itu, Ari juga membuka peluang kesempatan bisnis bagi sektor swasta di bidang Infrastruktur. Ia mengatakan, saat ini Indonesia sedang giat membangun berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara

serta pembangkit tenaga listrik, yang membutuhkan investasi yang besar.

Selama di Austria, delegasi BKSAP melakukan kunjungan ke parlemen, Kementerian Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria dan kunjungan lapangan ke Siemens Mobility. Di pabrik seluas 14 ha itu, delegasi berkesempatan melihat langsung proses perakitan kereta dari rangka hingga menjadi barang jadi.

Dalam kunjungan tersebut, Director of Sales Siemens Mobility Christoph Masopust mengatakan ingin berpartisipasi dalam pembangunan transportasi publik di Indonesia, terutama untuk transportasi massal kereta api.

Menanggapi hal itu, Anggota BKSAP DPR RI Rachel Maryam mengatakan akan menindaklanjuti peluang kerja sama tersebut kepada pemerintah, sembari meminta Siemens memberikan harga yang kompetitif. Ia juga mengingatkan, agar kerjasama tersebut nantinya tidak menimbulkan masalah ketenagakerjaan di dalam negeri, seperti penggunaan tenaga kerja asing.

Terkait hal ini, Masopust mengatakan pihaknya dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan di antara kedua pihak, antara lain menyangkut finansial, tenaga kerja, maupun transfer teknologi.

■ ann/sf



Kewenangan Bamus DPR dan DPRD Sama

Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Rajagukguk menegaskan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Bamus DPR dan DPRD kurang lebih sama, termasuk kewenangan untuk memperpanjang jangka waktu pembahasan rencana program kerja. Hal ini disampaikan Johnson saat menerima kunjungan Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur ke DPR RI.

menurut informasi tadi tidak pernah ada perpanjangan pembahasan Raperdanya karena setiap Raperda itu memang sudah ditentukan dalam satu tahun. Satu tahun itu mereka bisa selesaikan. Ini hal yang baik tentunya dari sisi perencanaan dan juga tentu juga dari sisi capaian realisasinya,” ungkap Johnson.

Menanggapi penjelasan Johnson, Anggota Bamus DPRD Kabupaten Tuban Kristiawan menilai banyak hal yang dapat dipelajari dari DPR. Untuk itu segala masukan dari diskusi ini akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di DPRD.

“DPR RI sebagai panutan kami di daerah dengan penjadwalan yang sepertinya sangat sempurna terutama di dalam proses penjadwalan. Kami sudah mendapat pencerahan ternyata di DPRD pun bisa. Jadi ketika nanti pada saat sebuah kegiatan di DPRD itu belum selesai ya kita paripurnakan ulang untuk di proses kelanjutan diraperda itu sendiri,” katanya.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban Rudi Arianto, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tuban Das Nurhadi Sunar dan Anggota Badan Kehormatan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tuban. ■ apr/sc

Dalam diskusi terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota disampaikan bahwa, DPRD Kabupaten Tuban hadapi persoalan ketika menjadwalkan kegiatan-kegiatan di DPRD seperti saat membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kerap kali membutuhkan waktu yang lama sementara Program Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD sesuai tata tertib ditargetkan 1 tahun.

“Kalau DPR boleh karena DPR mengatakan paling lama 3 masa persidangan kemudian boleh

diperpanjang. Di DPRD pun bisa dilakukan hal yang sama, hanya di DPRD punya pemahaman seolah-olah kalau lewat tahun akan dibahas ulang. Sebenarnya tidak harus dibahas ulang,” jelas Johnson di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Ia menambahkan ini hanya persoalan tata tertib. Apabila dalam tatib tersebut ada poin-poin yang tidak sesuai dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perlu dikaji secara matang terlebih dahulu. Namun Johnson mengapresiasi kedisiplinan DPRD Kabupaten Tuban yang selama ini dapat menyelesaikan Raperda sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

“Tapi di Kabupaten Tuban sendiri



Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Rajagukguk

Foto: Jaka/od



Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin dan Anggota Banggar DPR melihat maket Prov. Sumsel

Foto: Azika/od

Penerimaan Pajak Harus Genjot Perekonomian Sumsel

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa indeks penerimaan pajak di Sumatera Selatan pada kuartal pertama sudah mencapai 25,8 persen dari total yang ditargetkan dari penerimaan APBD. Keterangan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, di sela-sela Kunjungan Kerja Banggar ke Sumsel.

Azis berharap dalam kurun waktu dari bulan Juni sampai akhir tahun nanti, penerimaan pajak bisa digenjot, sehingga dapat memberikan *multiplier effect* bagi kegiatan ekonomi Sumsel. Selain itu, peran dari sektor Bank Indonesia dan Bea Cukai bisa berjalan.

“Tentu masukan-masukan yang disampaikan tadi harus dilakukan koordinasi dengan dinas serta pemerintah daerah terkait. Dalam hal ini misalkan stok beras, stok bahan baku agar nanti datanya akurasi dan mendapatkan fakta realistik,” jelasnya, usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Sumsel, perwakilan Bank Indonesia, Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Babel, Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim, Otoritas Jasa Keuangan dan OPD Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel, Jumat (25/5/2018).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dari semua masukan-masukan dari hasil diskusi ini, harus dilakukan koordinasi

dengan dinas-dinas pemerintah daerah terkait. Dalam hal misalnya stok beras, stok bahan baku, supaya nanti keakuratan datanya menjadi suatu fakta dan realis. Selain itu, sektor pangan juga tercipta realisasi penguatan-penguatan ekonomi yang ada di daerah di tahun 2019.

“Kami berharap di tahun 2019 bisa membuat suatu ilustrasi agar swasembada dalam sektor pangan dan kebutuhan bisa menjadi penguatan ekonomi di daerah. Misalkan petani, apakah kemajuan teknologi sistem pupuk, kemudian metode penanaman dan lain sebagainya. Begitu juga pada sektor perikanan, kemudian jalan dan lain sebagainya, sehingga nantinya dapat mengenai sasaran dengan tepat,” ungkapnya.

Terkait persiapan Asian Games yang akan digelar di Jakarta dan Sumsel pada Agustus 2018 mendatang, Azis mengatakan pihaknya berharap seluruh persiapan segera selesai pada bulan Juni mendatang. Karena salah satu program pemerintah

adalah untuk mensukseskan Asian Games dan berjalan dengan baik.

“Dan kami dari sisi Banggar DPR RI akan mengawasi bagaimana infrastruktur ini selesai di bulan Juni kemudian pertanggung jawaban dari penggunaan infrastruktur dan sarana prasarana,” tambah Azis.

Dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel, Edwar Juliarta menyampaikan mengenai progres kesiapan Asian Games 2018. Secara umum kegiatan di Jakabaring Sport City sudah *on the track*.

“Sebelumnya sudah banyak seperti OCA, INASGOC dan yang terakhir delegasi dari Jepang melakukan kunjungan ke Jakabaring Sport City dan melihat langsung wisma atlet, rusunawa dan rusunami, mereka merasa puas dan dikarenakan venue-venue yang letaknya terintegrasi di satu wilayah,” jelas Edwar.

Sementara itu, Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Babel memaparkan mengenai evaluasi terhadap realisasi tahun 2017 dan rencana target penerimaan pajak pada tahun 2018 serta strategi dan usaha dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP). Sedangkan, Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim memaparkan mengenai strategi dalam meningkatkan penerimaan negara dan bea cukai. ■ azk/sf



Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua INASGOC, dan Ketua Pangel INAPGOC beserta jajarannya membahas persiapan acara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018, Senin (28/5). Foto: Naefuroji



Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) terkait penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5). Foto: Arief



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin pelepasan pensiunan tujuh pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5). Foto: Azka



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor
Zaman now?

IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE: SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY

- lombakritikterbaikDPR@gmail.com
- lombakritikterbaikDPR@yahoo.com
- [@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)
- [@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)
- [@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)